

## Pembangunan Tugu Selamat Datang Kab. Bogor Bakal Dilelang Juli

**CIBINONG (IM)**- Proyek pembangunan Tugu Selamat Datang, taman di Jalan Raya Kandang Roda-Pakansari dan Jalan Raya Tegar Beriman akan dilelang oleh Bagian Pengadaan Barang Jasa serta Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Juli mendatang. Hal itu karena DPKPP menunggu progres pembangunan jalan dan pedestrian yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) maupun penyedia jasa pemenang lelang proyeknya.

“Proyek yang terintegrasi dengan program Cibinong A City Beautiful akan kami lelang pada Bulan Juli mendatang, pada proyek pembangunan taman di Jalan Raya Kandang Roda-Pakansari. Alasannya baru akan dilelang nanti karena sambil

menunggu progres pekerjaan pembangunan jalan dan pedestriannya,” ucap Kepala DPKPP, Juanda Dimansyah pada wartawan, Rabu, (14/4).

Mantan Camat Gunung Putri ini meyakini proyek-proyek pembangunan tugu selamat datang dan taman akan selesai tepat waktu, atau bahkan tidak akan meluncur ke tahun 2022 mendatang.

“Proyek-proyek yang kami tangani kan nilainya Rp4-6 miliar atau di bawah Rp10 miliar hingga sebelum 90 atau 10 hari pasti akan selesai pekerjaannya,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara berharap proyek pembangunan tugu selamat datang dan taman di Jalan Raya Kandang Roda-Pakansari serta Jalan Tegar Beriman bermanfaat buat masyarakat. ● **gio**

## CBA Desak Kejari Segera Bertindak Terkait Dugaan Korupsi di PPE

**BOGOR (IM)**- Lembaga Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong Kabupaten Bogor agar bertindak cepat serta tegas menangani dugaan mega korupsi di Perumda PPE.

Sebagai bukti saat menangani proses penyidikan terkait dugaan korupsi oleh direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE) semasa kepemimpinan Radjab Tampubolon, belum satu orang pun yang ditetapkan tersangka.

Hal di sampaikan Sekretaris CBA, Jajang Nurjaman, saat menanggapi proses hukum yang tengah dilakukan Kejari Cibinong itu terkesan sangat lamban dan jalan di tempat.

Oleh karena itu, ia menyangkan, sudah sampai di tahun ketiga ini aparat penegak hukum (APH) Adhiyaksa ini tak kunjung menetapkan satu tersangka pun terkait dugaan korupsi tersebut.

“Kejaksaan sebagai instansi yang berwenang melakukan penyidikan kasus korupsi, karena dalam menetapkan tersangka tidak perlu harus menunggu hasil audit BPK,” ungkap Jajang, kemarin.

Pria berambut gondrong itu melanjutkan, apabila dalam hal ini Kejari bekerja dengan benar dan serius, tentunya akan sangat mudah menentukan unsur-unsur

melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi bagi direksi PT PPE kala itu.

“Dari sini proses penyidikan bisa terus berjalan dan progres atau tidaknya bisa dilihat dalam penetapan tersangka,” tegasnya.

Bagi Jajang, dalih menunggu hasil audit BPK patut diduga hanya menutupi kinerja Kejari Cibinong, ada kesan lamban dan tidak ada keseriusan dalam memberantas korupsi di Bumi Tegar Beriman tersebut.

“Selain itu, dari segi waktu proses audit BPK soal kerugian negara dugaan korupsi, PT PPE seharusnya sudah rampung dalam kurun waktu setahun lebih ini,” ujarnya.

Melihat fakta demikian, Jajang menilai, bahwa menunggu setelah surat keputusan BPK terkait audit kerugian negara telah keluar, Kejari tidak lagi bingung harus ngapain dan langsung menetapkan tersangka sebagai pihak bertanggung jawab atas kerugian uang negara yang mencapai puluhan miliar tersebut.

Sekadar diketahui, penanganan kasus Perseroan Terbatas Prayoga Pertambangan dan Energi (PT. PPE) yang diduga merugikan uang rakyat senilai kurang lebih mencapai Rp80 miliar, kini masih jalan di tempat.

Pasalnya, kasus yang ditangani oleh Kejari sejak awal tahun 2018, dalam itu, hingga kini masih dalam tahap menunggu hasil audit oleh BPK RI. ● **gio**



HARI RAYA GALUNGAN

Umat Hindu bersembahyang saat Hari Raya Galungan di Pura Jagatnatha, Denpasar, Bali, Rabu (14/4). Perayaan Hari Raya Galungan yang merupakan hari kemenangan kebenaran (Dharma) atas kejahatan (Adharma) itu diikuti umat Hindu di Bali dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

## Lelang Stadion GBLA Ditargetkan Rampung 2021

**BANDUNG (IM)**- Pemenang lelang Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) ditargetkan selesai 2021. Proses saat ini, adalah menuntaskan urusan administrasi terkait surat laik fungsi dan laiklan studi stadion. “Alhamdulillah sudah turun surat laik fungsi, dan sekarang sedang menunggu pihak ketiga untuk kelainan studinya,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung, Edi Marwoto, Rabu (14/4).

Menurut dia, apabila dokumen administrasi telah lengkap, maka akan dianalisis tim yang dibentuk wali Kota Bandung. Langkah berikutnya adalah, dilanjutkan lelang hingga pemenang ditentukan. Dia menjelaskan, surat laik fungsi dikeluarkan dinas terkait seperti Dinas Tata Ruang dan menyertakan para ahli. Pihaknya menargetkan 2021

telah terdapat pemenang lelang yang akan mengelola Stadion GBLA. “Kita targetkan sesuai arahan pak wali, tuntas sampai ada pemenang tahun 2021. Mudah-mudahan tidak ada kendala,” ucapnya.

Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengatakan, lelang dilakukan mengacu kepada aturan pemerintah daerah tentang pengelolaan barang milik daerah. Pihaknya mengerjakan Stadion GBLA dan aset lainnya karena biaya yang digelontorkan dari APBD untuk pengelolaan besar dan cenderung memberatkan.

“Kenapa dikerjasamakan, karena kita enggak mungkin operasional dari kita, APBD berat. Kita harus kerjasamakan dengan lain bukan hanya GBLA tapi sarana aset lainnya,” kata Oded. ● **pur**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

## WAKSINASI BULAN RAMADHAN DI BANDUNG

Vaksinasi menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/4). Pemerintah tetap melaksanakan vaksinasi selama bulan Ramadhan dengan berpedoman fatwa MUI tentang vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa.

# Kabupaten Bogor Perketat PPKM Mikro Selama Ramadan

Berkaitan pelaksanaan salat Idulfitri, dapat dilaksanakan terbatas di tiap RT dan RW saja. Tidak boleh dilaksanakan di lapangan besar karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Jadi pelaksanaan salat Idulfitri dilaksanakan di masing-masing wilayah dengan tidak mendatangkan warga dari luar wilayah tersebut.

**CIBINONG (IM)**- Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan, pihaknya memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)

mikro saat Ramadan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut diputuskan melalui rapat koordinasi kebijakan penanganan

Covid-19 di Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.

Ade mengatakan, rapat koordinasi dilakukan dalam rangka persiapan jelang Ramadan 1442 H dan membahas perubahan surat edaran yang mengatur tentang salat tarawih dan beberapa pembatasan kegiatan masyarakat saat Ramadan.

Dia menuturkan, kegiatan di masjid dan musala hanya dapat dilakukan salat fardu dan tarawih. Untuk sunah i'tikaf belum diperbolehkan. “Salat tarawih berjemaah itu boleh dilakukan seperti biasa selama menerapkan protokol kes-

ehatan jarak 1 meter antarjemaah, dan harus dilaksanakan penyemprotan disinfektan,” kata Ade Rabu (14/3).

Kemudian, buka puasa bersama di kantor atau perusahaan boleh dilakukan dengan jumlah 50% dari kapasitas ruangan. Adapun jam operasional restoran dibuka pada pukul 14.00-21.00 WIB, sementara untuk sahur dari pukul 02.00-04.30 WIB.

“Tempat hiburan seperti rumah bernyanyi, spa, panti pijat ditutup selama Ramadan, sementara kegiatan fitness masih diperbolehkan sesuai jam buka,” kata dia.

Dia menambahkan, berke-

laksanaan salat Idulfitri, dapat dilaksanakan terbatas di tiap RT dan RW saja. Tidak boleh dilaksanakan di lapangan besar karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan vaksinasi belum menyeluruh dilakukan di Kabupaten Bogor.

“Kita harus menjaga protokol kesehatan (Prokes) Covid 19 dan dilaksanakan sesuai aturan PPKM berbasis mikro. Jadi untuk pelaksanaan salat Idulfitri dilaksanakan di masing-masing wilayah dengan tidak mendatangkan warga dari luar wilayah tersebut, dan diawasi langsung oleh satgas dari masing-masing kecamatan,” tambahnya. ● **gio**

## Terminal Perbatasan Kota dan Kabupaten Bogor Belum Terwujud

**BOGOR (IM)**- Rencana pembangunan terminal batas kota antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor belum terwujud. Sebab, di antara kedua wilayah ini belum ada implementasi dari MoU yang sudah disepakati.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo. Padahal, keberadaan terminal di perbatasan wilayah Kota dan Kabupaten Bogor dinilai penting. Mengingat masalah transportasi berakar di keberadaan angkutan kota atau angkot.

“Ya kita masih sekadang sebuah MoU tertulisi, tapi implementasinya belum. Kalau kita memang semuanya ini kita sudah ke arah sana (perencanaan pembangunan) lah. Tapi tinggal tunggu temen-temen Kabupaten Bogor,” ujar Eko, Rabu (14/4).

Lebih lanjut, Eko menilai keberadaan terminal di perbatasan kedua wilayah ini cukup vital. Terutama untuk memaksimalkan program reduksi angkot di Kota Bogor. Sejauh ini, tercatat ada sekitar 4.000 unit angkot dari wilayah Kabupaten Bogor yang masuk ke Kota Bogor.

Dengan adanya terminal batas kota yang disinergikan dengan program milik Kota Bogor, nantinya angkot dapat mengantar penumpang antarkecamatan dan antarkelurahan. Sehingga tidak perlu masuk ke jantung kota, atau tidak perlu

melewati perputaran kota. “Nah di kita ini kan sedang menjalankan program reduksi angkot 3:1 dan 2:1, jadi kalau ada terminal batas kota, saya rasa cukup membantu mengurangi masalah transportasi di Kota Bogor,” jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data sementara dari Dishub Kota Bogor, ada 140 angkot dari 3.412 angkot yang sudah direduksi pada 2020. Sehingga, saat ini angkot Kota Bogor yang beroperasi ada sekitar 3.272 unit.

Selain itu, lanjutnya, di tengah pandemi Covid-19, jumlah angkot yang beredar di Kota Bogor pun berkurang. Sebab, terdapat penurunan jumlah penumpang dan mahal biaya operasional. Meskipun beroperasi angkot tergantung pada masing-masing pengusaha angkot.

Namun, dia mengaku sudah menyampaikan perihal pembangunan terminal batas kota ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Agar segera membantu dibangunnya terminal di antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Termasuk mengenai program reduksi angkot agar terbantu dengan adanya terminal batas kota.

“Kita sudah sampaikan ke Pemprov Jawa Barat dan ini terus kita dorong karena kita ada program reduksi 2:1, kemudian ada 3:1, pergantian

bus, segala macam. Keperluan Kota Bogor yang sudah jadi skala prioritas kita,” jelasnya.

Eko menambahkan, sebelumnya pembahasan perihal terminal batas kota telah dibicarakan bersama Pemprov Jawa Barat serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Dari pembahasan tersebut, terdapat usulan mengenai beberapa titik yang akan dijadikan terminal batas kota.

Usulan terminal di batas kota itu, antara lain, di Bubulak atau Laladon yang terletak di bagian barat Kota Bogor, di Ciluar yakni di bagian utara Kota Bogor, di Ciawi di bagian timur Kota Bogor, di Mulyaharja dan Kebon Pedes pada bagian selatan Kota Bogor, serta di Citerop Kabupaten Bogor.

“Nanti kita masuk ke situ. Tarol yang membangun, apabila kabupaten terlambat, provinsi juga ngebangun lah,” kata Eko.

Dalam jangka dekat, Eko berharap Jawa Barat dapat mempertemukan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor untuk dapat segera mengoperasikan terminal batas kota. Sehingga, angkot yang beredar di Kota dan Kabupaten Bogor dapat diatur.

“Ada (terminal batas kota) di Ciawi, Bubulak atau Laladon bisa difungsikan. Terserahlah itu. Nanti kalau Bubulak dan Laladon difungsikan, dibagusin lagi, Bubulak bisa jadi park and ride,” ujarnya. ● **gio**



IDN/ANTARA

## DONASI MAINAN UNTUK ANAK NTT

Seorang anak menyerahkan boneka untuk donasi kepada anak-anak korban bencana alam Nusa Tenggara Timur di Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/4). Aksi donasi mainan peduli NTT tersebut sebagai wujud solidaritas warga Solo untuk meringankan penderitaan anak-anak korban bencana alam.

## KASUS COVID-19 KOTA BOGOR TURUN

# Bima Arya Khawatir Muncul Gelombang Kedua

**BOGOR (IM)**- Wali Kota Bogor, Bima Arya khawatir akan terjadi lonjakan kasus Covid-19 gelombang kedua pada Ramadan dan libur Lebaran, meski saat ini penularan mulai menurun. Alasannya, distribusi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat mengalami kendala.

Untuk mengantisipasi munculnya gelombang kedua Covid-19, Bima Arya mengajak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor menjaga dan mengawasi penerapan protokol kesehatan. “Antisipasi kemungkinan munculnya penularan Covid-19 harus terus dilakukan. Kita tidak boleh lengah,” kata Wali Kota Bogor itu, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan kasus Covid-19 mengalami penurunan, terutama pasien dengan gejala sedang hingga berat. Retno menduga hal itu terjadi karena Dinas Kesehatan terus

melakukan vaksinasi Covid-19 sejak Januari 2021.

“Vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor sudah menjangkau banyak warga, sehingga jika terjadi penularan gejalanya tidak berat dan tidak perlu dirawat di rumah sakit,” ujarnya.

Data Dinas Kesehatan Kota Bogor menunjukkan pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh dalam dua hari terakhir mencapai 414 orang. Total pasien sembuh menjadi 13.785 pasien atau 95 persen dari keseluruhan kasus Covid-19 di Bogor yang tercatat 14.510 kasus.

Data Covid-19 itu menunjukkan 140 pasien sembuh pada hari Selasa dan 272 pasien sembuh pada Senin 12 April lalu. Dengan peningkatan pasien sembuh, tingkat keterisian tempat tidur pasien Covid-19 di 21 rumah sakit rujukan Kota Bogor juga turun drastis. ● **gio**

## TERKAIT PPDB 2021

# Komisi V DPRD Jabar Siap Awasi Dinas Pendidikan

**BANDUNG (IM)**- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan siap mendorong dan mengawasi dinas pendidikan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK/SLB secara online.

“Khususnya dalam hal ini membahas masalah masalah faktual bagaimana persiapan dan keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, di Bandung, Rabu (14/4).

Komisi V DPRD Jawa Barat, kata dia, akan terus mengupayakan mendukung agar pelaksanaan PPDB yang tertib dan transparan, terlebih ini PPDB online dan sistemnya berbeda dengan tahun lalu dan dilaksanakan di saat pandemi Covid-19.

“Kami akan terus kawal

dalam prosesnya, agar prosesnya berjalan lancar dan semua anak di Jawa Barat bisa sekolah,” kata dia.

Beberapa waktu lalu, kata dia, Komisi V DPRD Jabar telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang.

Abdul Hadi mendorong, Pemprov Jabar agar lebih memperhatikan lagi keberadaan Kantor Cabang Dinas Wilayah VIII di Kabupaten Sumedang pasalnya sampai detik ini Kcd Wilayah VIII tersebut masih belum memiliki kantor yang definitif.

“Kami berharap di wilayah VIII ini zero case dan ditambah doa kami agar kantor ini disegerakan mempunyai kantor yang layak. Bisa jadi tempat yang representatif, karena ini masalah citra provinsi artinya pemprov serius dalam mengurus OPD nya,” kata dia. ● **pur**